

Bab III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Sejarah Singkat Pegadaian

Lembaga Keuangan yang diselenggarakan dengan menggunakan sistem global telah dikenal di bumi Nusantara ini pada masa *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Institusi sebagai pelaksana usaha bidang keuangan dengan sistem gadai ini dinamakan Bank Van Leening, yang didirikan di Batavia (Jakarta) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Van Imhoff, tanggal 28 Agustus 1746.

Secara Kronologis, tahapan masa perjalanan institusi gadai ini adalah sebagai berikut:

1. Dari tahun 1746 sampai dengan 1811, dengan nama Bank Van Leening, pada masa pemerintahan Belanda, Gubernur Jenderal Van Imhoff dan Daendels.
2. Dari tahun 1811 sampai dengan 1816 didirikan dengan *Licentie Stelsel*, yang menetapkan bahwa pihak swasta diperbolehkan melakukan usaha gadai asal memiliki lisensi (ijin). Ternyata dalam prakteknya para pemegang lisensi menggunakan kesempatan untuk mengadakan praktek riba yang merugikan rakyat kecil dan dari usahanya itu mereka memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu mereka memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu, pada tahun 1814 *Licentie Stelsel* diganti dengan *Pacht Stelsel*,

yang menetapkan pihak swasta boleh melakukan usaha gadai kepada pemerintahan, pada masa pemerintahan Inggris, Raffles.

3. Dari tahun 1816 sampai dengan 1870, tetap dengan *Pacht Stelsel*, pada masa pemerintahan Belanda.
4. Dari tahun 1870 sampai dengan 1945 *Pacht Stelsel* dihapuskan dan diganti kembali dengan *Licentie Stelsel*, pada tahun 1901 didirikan pegadaian Negara pertama di Sukabumi, masa pemerintahan Belanda dengan cara monopoli oleh pemerintah, berdasarkan Staatblad No 131 tahun 1901. Pada masa itu, Pegadaian mempunyai tugas pokok menolong rakyat kecil yang sangat membutuhkan uang. Tujuannya adalah agar mereka tidak terjerat oleh praktek-praktek riba dan lintah darat yang merajalela pada saat itu. Karena tujuan itulah dalam waktu yang relatif singkat Pegadaian berkembang pesat, sehingga pada akhir jaman kolonial telah berdiri 492 buah pegadaian yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
5. Dari masa kemerdekaan Indonesia 1945 dan seterusnya dikelola oleh pemerintah Indonesia.

Ketepatan waktu pendirian Pegadaian Negara yaitu pada tanggal 1 April 1901, dan dinyatakan sebagai Pegadaian Pertama didirikan di Indonesia yang berlokasi di Sukabumi. Oleh karena itu pada tanggal 1 April dijadikan Hari Lahir Pegadaian yang digunakan sebagai peringatan setiap tahunnya bagi seluruh jajaran pegawai Pegadaian.

Sepanjang sejarah Pegadaian sejak berdirinya telah beberapa kali mengadakan perubahan status sebagai badan hukum. Sampai dengan tahun 1961 dengan status Jawatan Pegadaian, kemudian sejak tanggal 1 Januari 1961 berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960. Kemudian setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Negara, status Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan sam[ai dengan tahun 1990.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan perusahaan sesuai perkembangan ekonomi dan moneter dewasa ini, pemerintah memandang perlu untuk merubah status Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

3.2. Perkembangan Usaha Perum Pegadaian

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perum Pegadaian adalah Badan Usaha tunggal yang diberi wewenang Pemerintah untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (KUHP Perdata psl. 1150 – 1160, Pandhuise Reglement No. 81/1928 dan PP 10 Tahun 1990). Artinya bahwa pada saat memperoleh pinjaman nasabah harus menyerahkan harta geraknya kepada Pegadaian sebagai jaminan. Dalam hal bila nasabah tidak melunasi pinjamannya, maka baranga jaminannya akan dilelang. Lelang itu sendiri adalah merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh jika nasabah benar-benar sudah tidak mampu melunasi, mancicil, dan

membayar sewa modal pinjamannya. Hasil dari lelang digunakan untuk melunasi uang pinjaman (UP) dan sewa modal (SM) serta biaya administrasi lelang. Jika hasil lelang melebihi dari jumlah uang pinjaman dan sewa modal serta biaya administrasi lelang, sisanya dikembalikan kepada nasabah. Tetapi jika hasil lelang lebih rendah maka akan menjadi resiko Pegadaian.

Dalam praktek operasi usaha, seperti terlihat pada tabel 3.1. pinjaman yang diberikan adalah dalam skala kecil, yaitu dari jumlah plafon Rp. 5000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-, dengan jaminan barang bergerak seperti kain, pecah belah, sepeda, sepeda motor, elektronik dan perhiasan. Tingkat sewa modal (bunga) adalah antara 2,5% - 3,5% per bulan, jangka waktu pinjaman 120 hari (4 bulan) dengan kemungkinan untuk diperpanjang kembali.

Tabel 3.1. Golongan Kredit, Sewa Modal, dan Jangka Waktu.

Gol	Pagu Kredit	SM/15 hari	Jangka Waktu	Jenis Pinjaman
A	5.000-40.000	1,25%	120 hari	Alat rumah tangga, kain, perhiasan, sepeda
B	40.500-150.000	1,25%	120 hari	Perhiasan, sepeda, elektronik
C	151.000-500.000	1,25%	120 hari	Perhiasan, sepeda, elektronik
D	510.000-2.500.000	1,25%	120 hari	Perhiasan, elektronik, sepeda motor
	2.510.000-10.000.000	1,25%	120 hari	Perhiasan, sepeda motor, mobil
	10.100.000-20.000.000	1,25%	120 hari	Perhiasan, mobil

Sasaran utama nasabah adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan mereka yang tidak punya akses ke bank (tidak bisa

dapat kredit rekening koran, kartu ATM atau credit card) dan butuh dana mendesak.

Jangkauan pelayanan Perum Pegadaian cukup luas, terdapat hampir disetiap kota. Jumlah cabang Pegadaian sampai saat ini sebanyak 597 buah cabang. Sebagian terbesar ada di pulau Jawa (393 cabang) dan Madura, Sumatera 79 cabang, Kalimantan 25 cabang, Sulawesi 41 cabang, Maluku dan Irian 8 cabang, Bali 13 cabang, NTB 19 cabang dan NTT 19 cabang (termasuk Dili 2). Setiap tahun diharapkan dapat dibuka cabang baru sebanyak 15 cabang. Pembukaan cabang tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomis, tapi juga berdasarakan permintaan masyarakat maupun Pemerintah Daerah setempat. Untuk mengendalikan kegiatan operasional, Kantor Pusat dibantu oleh 12 Kantor Daerah dan 2 Kantor Perwakilan Daerah. Setiap kantor Daerah membawahi 35 sampai 45 cabang Pegadaian.

Mengingat potongan barang yang disimpan cukup banyak, maka Pegadaian membutuhkan gudang penyimpanan yang cukup besar serta tenaga setengah ahli yang cukup banyak. Begitu juga karena masih malu maka kantor-kantor pelayanan diupayakan mendekati/menyerupai bank disertai pelayanan oleh petugas yang manusiawi dan program promosi yang sangat intensif.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja usaha perusahaan dipakai berbagai tolok ukur yaitu: (1) jumlah kredit yang disalurkan setahun, (2) jumlah nasabah yang dilayani, (3) jumlah barang jaminan yang disimpan, (4) pendapatan sewa modal, (5) laba usaha, (6) pertumbuhan asset (aktiva) serta berbagai tolok ukur keuangan lain, yaitu Rentabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Produktivitas.

3.3. Misi Perum Pegadaian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1990, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perum Pegadaian mempunyai misi sebagai berikut:

- Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memupuk keuntungan.
- Mencegah praktek ijon, gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dalam pelaksanaan misinya untuk ikut membangun ekonomi rakyat, maka sejak tahun 1990 sampai sekarang telah dilakukan peningkatan pagu kredit, pembukaan kantor cabang baru diseluruh propinsi dan kabupaten/kotamadya dengan tujuan untuk perluasan jangkauan pelayanan.

3.4. Visi, Sasaran dan Strategi Perum Pegadaian

Menghadapi tahun 2003 memang betul akan tercipta persaingan bebas untuk setiap produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat termasuk jasa oleh lembaga kuangan. Berbagai deregulasi di sektor moneter dan di sektor riil memang diperkirakan akan diteruskan Pemerintah. Namun disisi lain masih diragukan kesiapan masyarakat menengah ke bawah terutama di Kabupaten

dan Pedesaan (yang akan masih bersifat agraris) untuk menghadapinya. Disamping itu akibat pertumbuhan industri di perkotaan akan terjadi peningkatan urbanisasi, yang mengakibatkan pertumbuhan penduduknya akan menjadi banyak dan akan dihadang oleh tingkat biaya hidup yang meningkat pula. Dipihak lain pengaruh musim paceklik, akibat kemarau panjang, banjir, bahaya hama virus akan tetap ada yang belum mampu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian kebutuhan dana seketika apakah diperkotaan atau di pedesaan, baik oleh pegawai, karyawan, pengusaha kecil, pedagang, ataupun oleh petani, nelayan tetap ada. Atas dasar hal tersebut, visi Pegadaian adalah menjadi ***“Lembaga Pembiayaan Kredit dan Gadai yang Melayani Masyarakat Menengah ke Bawah Yang Inovatif dan Modern”***. Dalam jangka panjang pemberian kredit gadai diupayakan akan lebih murah dengan kualitas pelayanan yang lebih baik didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional (Samsir Kadir, 1997). Adapun misi dari Perum Pegadaian adalah ***“Ikut meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana berdasarkan hukum gadai secara inovatif dan melakukan usaha lain yang menunjang”***.

Sedangkan sasaran usaha / tujuan menjelang tahun 2003 adalah: (1) Pertumbuhan pemberian kredit gadai $\pm 20\%$ per tahun, didukung oleh usaha lain yang terkait (diversifikasi), (2) menjadi PERSERO yang go publik, (3) memiliki kinerja yang sehat.

Guna mencapai sasaran usaha tersebut strategi yang akan dilakukan antara lain adalah:

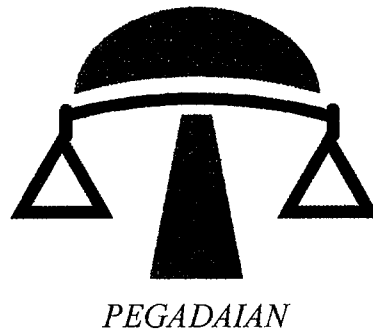
1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lembaga Kredit Gadai.
2. Perluasan pelayanan dengan pembukaan cabang-cabang baru yang secara finansial dan ekonomi *feasible*.
3. Pembinaan nasabah produktif yang berpotensi untuk menjadi pengusaha menengah yang handal.
4. Modernisasi sarana dan peralatan kerja untuk mewujudkan pelayanan yang efisien.
5. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan untuk menciptakan tenaga yang lebih profesional.
6. Penyederhanaan Struktur Organisasi yang ramping dan dinamis.
7. Pengelolaan keuangan yang sehat dan *accountable*.

3.5. Motto dan Logo Perum Pegadaian

Motto yang digunakan oleh Perum Pegadaian adalah "*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*". Perum Pegadaian merupakan suatu perusahaan jasa yang mampu mengatasi kesulitan keuangan dalam waktu yang relatif singkat tanpa menuntut prosedur dan syarat-syarat yang rumit. Dengan prosedur yang sederhana ini, menyebabkan Perum Pegadaian dekat dengan kehidupan dan ditempatkan sebagai alternatif dalam mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Logo Perum Pegadaian adalah pohon rindang berwarna hijau disertai alat timbangan berwarna hitam dengan tulisan Pegadaian dengan huruf miring yang terletak dibawahnya.

Gambar 3.1. Logo Perum Pegadaian.



Arti gambar pada logo Perum Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Pohon Rindang. Mempunyai arti sebagai tempat berlindung. Pegadaian memberi perlindungan terhadap masyarakat dari jeratan lintah darat ataupun rentenir. Pegadaian membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan uang untuk keperluan usaha melalui pinjaman dengan sistem gadai. Perlindungan berarti memberi ketenangan dan keteduhan, sehingga pohon rindang yang diberi warna hijau secara keseluruhan dari batang hingga daun, yang berarti Pegadaian merupakan satu sistem dan pelayanan yang memberikan keteduhan.
2. Timbangan. Melambangkan adanya ketepatan, akurasi, dan keseimbangan dalam hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Hal ini berarti bahwa dalam Pegadaian barang, perhitungannya harus

wajar dan adil bagi kedua belah pihak, serta seimbang antara nilai barang dengan nilai uang yang diharapkan.

3. Tulisan *PEGADAIAN*. Disini tulisan Pegadaian menggunakan huruf miring yang melambungkan dinamisasi dan aktivitas. Hal ini berarti bahwa Pegadaian tidak hanya menunggu nasabah, tetapi aktif mencari nasabah dengan memberi kesan bahwa Pegadaianlah yang membutuhkan masyarakat, bukanlah sebaliknya. Perwujudannya antara lain berupa iklan di media massa maupun radio.

3.6. Produk Perum Pegadaian

Produk yang dihasilkan oleh Perum Pegadaian ada 4 macam, yaitu kredit gadai, jasa taksiran, jasa titipan, dan toko emas (galeri 24).

3.6.1. Kredit Gadai

Kredit gadai adalah pemberian kredit kepada nasabah yang didasarkan atas hukum gadai. Jasa ini merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh Perum Pegadaian. Secara umum jenis kredit yang disediakan oleh Perum Pegadaian dibedakan menjadi kredit konsumtif yaitu kredit yang diperoleh nasabah untuk keperluan konsumsi (memenuhi kebutuhan sehari-hari), dan kredit produktif yaitu kredit yang diperoleh nasabah untuk tujuan-tujuan yang produktif (untuk menambah modal usaha).

3.6.2. Jasa Taksiran

Jasa Taksiran adalah produk yang disediakan untuk masyarakat yang ingin mengetahui keaslian atau kebenaran kualitas perhiasan atau permata

berlian miliknya. Atas barang yang diujikan itu, Pegadaian mengeluarkan sertifikat atau surat pernyataan tentang kadar atau kualitas perhiasan tersebut. Jasa ini disediakan agar masyarakat dapat mengetahui keaslian atau kebenaran perhiasan yang dimiliki atau yang dibelinya di toko perhiasan atau orang lain. Biaya pengujian sangat murah, yaitu antara Rp. 500,- sampai Rp. 5000,- tergantung jenis dan nilai barang yang bersangkutan.

3.6.3. Jasa Penitipan Barang

Jasa Penitipan Barang ini disediakan bagi masyarakat yang ingin meninggalkan barang-barang berharga miliknya dengan perasaan yang aman dan lega. Masyarakat itu misalnya yang akan libur pulang kampung. Barang yang bisa dititipkan adalah sepeda motor, surat berharga (saham, obligasi, perjanjian, BPKB) dan barang-barang lainnya.

3.6.4. Toko Emas (Galeri 24)

Pegadaian juga menyediakan barang perhiasan emas dengan kualitas standar dan kadar yang benar serta desain modern. Perhiasan emas ini dijamin kebenarannya dan keasliannya dengan sertifikat. Misi yang terkandung dalam unit usaha ini adalah membantu untuk memperoleh perhiasan emas yang benar sesuai kualitas barang dan membantu pemerintah untuk mewujudkan standarisasi kadar emas di Indonesia. Dengan misi ini diharapkan tidak ada toko emas yang membohongi kadar emas yang dijual kepada masyarakat. Sampai saat ini Toko Emas (Galeri 24) diseluruh Indonesia baru berjumlah 25 unit dan setiap tahun akan bertambah pada lokasi dan lingkungan yang mendukung.

3.7. Struktur Organisasi Perum Pegadaian

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. Sm. 2/1/29 tanggal 27 Oktober 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian, organisasi Perum Pegadaian disusun dalam dua tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah. Organisasi tingkat daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu Kantor Daerah dan Kantor Cabang.

Organisasi tingkat pusat (Kantor Pusat) adalah kedudukan dan pusat kegiatan administratif perusahaan. Kantor Daerah adalah perwakilan perusahaan di daerah yang bertugas melaksanakan tugas-tugas manajerial dan administratif perusahaan di daerah berdasarkan kebijaksanaan direksi. Sedangkan Kantor Cabang adalah unit pelaksana operasi perusahaan di daerah yang langsung melayani masyarakat. Struktur organisasi di Perum Pegadaian merupakan struktur organisasi fungsional, dimana pimpinan organisasi tingkat atas membawahi pimpinan organisasi di bawahnya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

3.7.1. Struktur Organisasi Kantor Pusat Perum Pegadaian

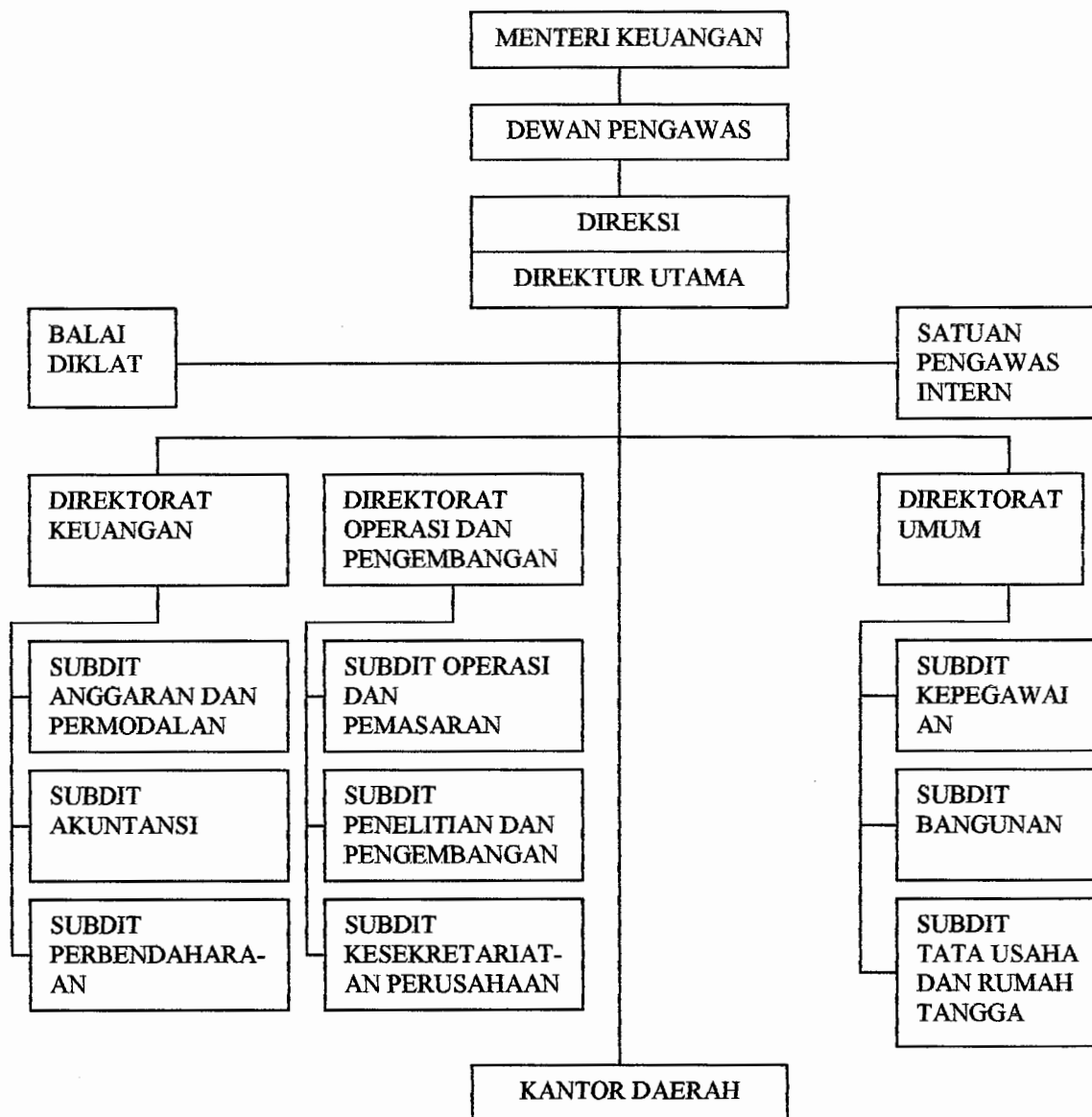
Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direksi yang bertanggung jawab terhadap Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengolahan perusahaan, Menteri Keuangan dibantu oleh Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Direksi sebagai pimpinan perusahaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Direktur Utama sebagai ketua, dengan anggota Direktorat Keuangan, Direktorat Operasi dan

Pengembangan serta Direktorat Umum. Untuk melaksanakan kebijaksanaan pembinaan dan pengolahan kegiatan pendidikan dan latihan, maka Direksi dibantu oleh Balai Pendidikan dan Latihan untuk melaksanakannya. Dalam mengadakan penilaian, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Tiap-tiap jabatan dalam organisasi mempunyai tugas sendiri-sendiri, yaitu:

- Direktorat Keuangan, bertugas membina dan mengelola sebagian tugas pokok perusahaan di bidang keuangan.
- Direktorat Operasi dan Pengembangan, bertugas membina dan mengelola sebagian tugas pokok perusahaan di bidang operasi, pengembangan usaha dan kesekretariatan perusahaan.
- Direktorat Umum, bertugas membina dan mengelola sebagai tugas pokok perusahaan di bidang kepegawaian, bangunan, tata usaha dan rumah tangga perusahaan.
- Balai Pendidikan dan Latihan, bertugas membina dan mengelola kegiatan pendidikan dan latihan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direksi.
- Satuan Pengawas Intern, bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengolahan (manajemen) dan pelaksanaannya, serta memberikan saran-saran perbaikan dan penindakan.

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kantor Pusat Perum Pegadaian.



3.8. Kantor Daerah VII Perum Pegadaian DI Yogyakarta

Kantor Daerah VII Perum Pegadaian DI Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Daerah. Kantor Daerah VII Yogyakarta sebagai salah

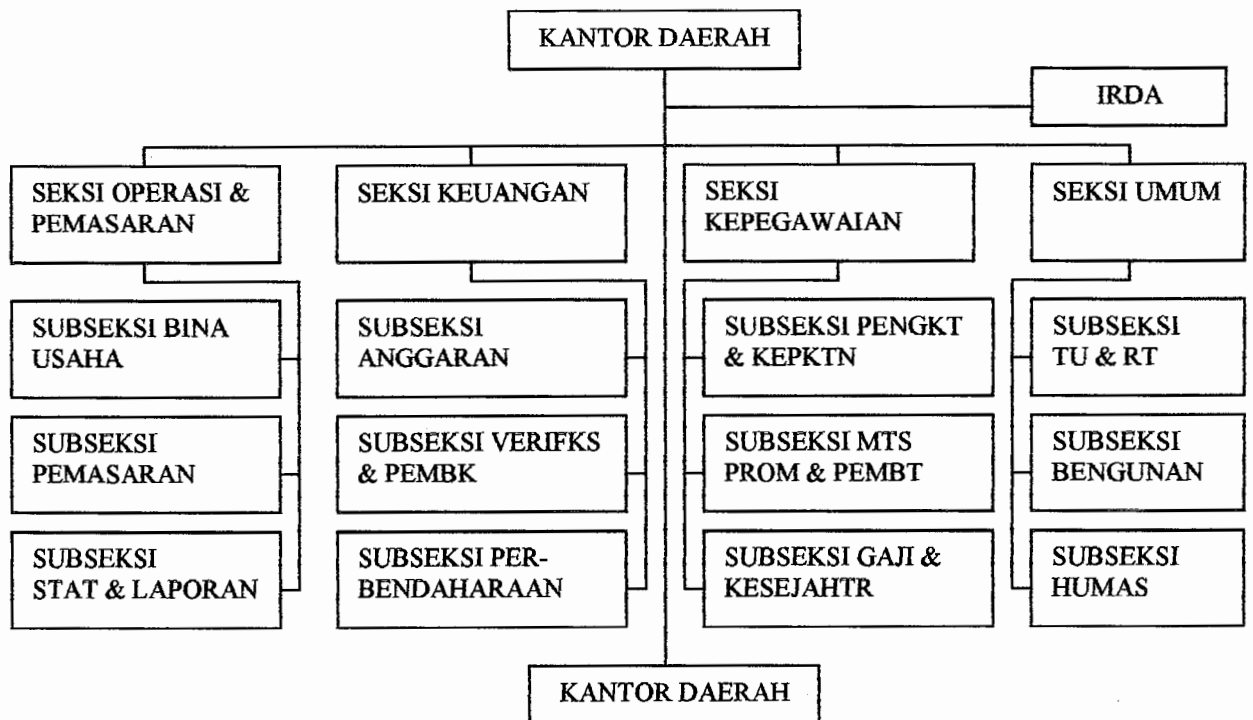
satu wujud desentralisasi perusahaan membawahi 57 kantor cabang yang tersebar di wilayah DI Yogyakarta dan sebagai wilayah Propinsi Jawa Tengah. Jumlah kantor cabang kelas I sebanyak 2 unit, kelas II 5 unit, dan kelas III sebanyak 50 unit. Jumlah pegawai perusahaan sebanyak 546 orang terdiri dari pegawai kantor daerah sebanyak 63 orang dan pegawai kantor cabang sebanyak 483 orang. Sedangkan jumlah nasabah sebanyak 903.970 orang.

3.7.2. Organisasi Kantor Daerah VII Perum Pegadaian DI Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Daerah bertanggungjawab langsung kepada Direksi Perum Pegadaian di Jakarta. Ka Kanda merupakan wakil direksi di daerah yang mempunyai tugas membantu direksi di dalam menjalankan operasional perusahaan. Di dalam melaksanakan tugas di daerah Ka Kanda VII DI Yogyakarta dibantu oleh empat Kepala Seksi, terdiri dari Kepala Seksi Keuangan, Kepegawaian, Umum serta Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran.

Untuk mengawasi operasional perusahaan agar dapat berjalan sesuai dengan aturan main yang ada, Ka Kanda VII dibantu oleh seorang Inspektur Daerah (Irda) yang bertanggungjawab langsung kepada Ka Kanda VII. Dan untuk melaksanakan tugasnya Inspektur daerah dibantu oleh beberapa pemeriksa.

Gambar 3.3. Struktur Organisasi Kantor Daerah VII Perum Pegadaian DI Yogyakarta



3.7.3. Analisa SWOT Kantor Daerah VII Perum Pegadaian DI

Yogyakarta

Secara operaional Kanda VII Yogyakarta terkait dengan kegiatan operasional kantor cabang, dapat dilihat Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman yang mungkin dihadapi, sebagai berikut ini:

- *Kekuatan.* Resiko usaha kecil, prosedur untuk berhubungan dengan pegadaian mudah, pelayanan cepat, penaksir yang berpengalaman, obyek gadai adalah barang bergerak yang banyak dimiliki oleh anggota

masyarakat, tidak ada biaya selain sewa modal dan asuransi monopoli dan telah lama berdiri.

- *Kelemahan.* Hanya satu jenis produk sumber daya manusia belum berwawasan bisnis, beberapa cabang mempunyai lokasi yang kurang menguntungkan, pembagian tugas yang tidak jelas, profesionalisme terbatas, terdapat beberapa karyawan tua dengan pendidikan rendah, barang jaminan harus ditinggal di Pegadaian, penampilan sarana dan prasarana yang kurang memadai, suku bunga relatif tinggi dibanding pesaing.
- *Kesempatan.* Potensi pasar yang masih terbuka luas, pembangunan di daerah, meningkatnya taraf hidup masyarakat, sarana transportasi dan komunikasi yang lebih baik di masa-masa mendatang.
- *Ancaman.* Beroperasinya BPR dan Koperasi, praktek pegadaian gelap, kesan Pegadaian identik dengan kumuh dan untuk golongan miskin, kemungkinan dicabutnya monopoli usaha gadai, serta adanya praktek calo dan orang-orang penghubung yang menambah biaya bagi nasabah. Serta kemungkinan segera muncul pegadaian swasta dan toko emas yang berpraktek gadai.

3.7.4. Misi, Visi, dan Tujuan Perum Pegadaian Kanda VII DIY

❖ Misi

1. Melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

umumnya melalui penyaluran kredit atas dasar hukum gadai, dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memupuk keuntungan.
3. Mencegah praktek ijon, gadai gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

❖ **Visi**

1. Sebagai lembaga pembiayaan kredit dan gadai yang melayani masyarakat menengah ke bawah yang inofatif dan modern.

Realisasivisi tersebut di atas di dukung oleh budaya perusahaan yang tumbuh dan berkembang dari dalam perusahaan yaitu:

- Inofatif
- Nilai moral tinggi
- Trampil
- Adi layanan
- Nuansa citra

Atau lebih dikenal dengan budaya Si *INTAN*

Sedangkan sesuai dengan PP No. 13 tahun 1998 pasal 2 ayat 1, maksud dan tujuan Perusahaan Umum adalah ***“menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemnfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa atu jasa yang mempunyai mutu tingi, sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan suatu perusahaan”***.

3.7.5. Garis Besar Kebijakan Manajemen Strategi Perusahaan

Setelah ditetapkan Visi dan Misi Perusahaan, maka berlandaskan visi dan misi tersebut, dirumuskan pula arah pengusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pasar.
2. Melaksanakan *Go Publik* dengan menerbitkan obligasi.
3. Peningkatan profesionalisme SDM.
4. Pengembangan usaha baru yang telah ada.

Guna mencapai arah pengusahaan perusahaan pada rencana strategis Perum Pegadaian, maka sasaran pengusahaan yang harus dicapai ditetapkan sebagai berikut:

1. Omset perkreditan meningkat 20% dari taksiran tahun sebelumnya.
2. Laba bersih (*earning after taxes*) meningkat sampai dengan 30%.
3. hasil usaha lain-lain menyumbang minimal 5% dari laba usaha.
4. Posisi keuangan yang *likuid* dan *solvable* dengan *current ratio* di atas 1 dan *debt to equity ratio* di bawah 3.
5. Tingkat kesehatan menurut ketentuan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 826/KMK/013/92 minimal "SEHAT" dan rating "A".

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka Perum Pegadaian Kanda VII Yogyakarta menentukan strategi pokok perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan optimalisasi kantor-kantor cabang sebagai ujung tombak operasi perusahaan

2. Melakukan perluasan pasar dengan membuka cabang baru atau filial di daerah yang menguntungkan (*feasible*).
3. Meningkatkan pelayanan kepada seluruh nasabah dengan baik, cepat, dan memuaskan.
4. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sumber daya perusahaan.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran uang perusahaan.
6. Melaksanakan pengembangan produk baru hingga mampu menyumbang 5% dari total pendapatan usaha.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan operasional.

Untuk mengimplementasikan strategi pengusahaan perusahaan dan strategi bisnis ke dalam fungsi yang ada dalam Perum Pegadaian, maka disusun strategi fungsional Perusahaan yang disusun dalam tiap bidang yaitu sebagai berikut:

Strategi Bidang Pemasaran dan Operasi.

1. Meningkatkan jumlah pelanggan melalui pembukaan kantor cabang baru dan promosi yang lebih agresif.
2. Peningkatan kepuasan pelanggan melalui perbaikan atau penyempurnaan sistem.

Untuk melaksanakan strategi tersebut langkah-langkah yang akan dilakukan:

- Peningkatan nasabah baru dan citra perusahaan.
- Pemeliharaan nasabah melalui perbaikan pelayanan dan produk.
- Perubahan periodisasi pelunasan.

- Perluasan pasar.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kantor cabang.
- Pengembangan produk dan diversifikasi.
- Peningkatkan Omset melalui penyempurnaan Sistem Informasi Operasi.
- Penambahan Kantor Cabang *Prototype*.

Strategi Bidang Organisasi dan SDM

1. Penyempurnaan organisasi yang lebih terdesentralisasi, atau struktur organisasi *flat*.
2. Peningkatan produktifitas SDM melalui:
 - Menyusun Man Power planning.
 - Menyusun dan melaksanakan program rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai.
 - Mengembangkan program karier individual.
 - mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SISPEK).
 - Memperbaiki dan mengembangkan program kesejahteraan karyawan.

Strategi Bidang Keuangan dan Akuntansi

Membuat pola kebijaksanaan pengelolaan keuangan ke arah tercapainya sasaran dan optimalisasi asset.

Langkah atau program yang akan dilakukan antara lain:

- Penyempurnaan sistem dan prosedur peranggaran, akuntansi dan perbendaharaan.

- Pengelolaan dana secara efisien dan efektif.
- Menyusun pelaporan keuangan yang tepat waktu, tertib dan akurat.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran perusahaan.
- Menerbitkan pelaksanaan tata usaha perpajakan.
- Penyempurnaan sistem pengelolaan piutang perusahaan.

Strategi Bidang Sarana dan Prasarana

Fokus pada upaya mewujudkan produktifitas yang tinggi, efisiensi, pelayanan dan citra Pegadaian melalui pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berdaya guna dan berhasil guna.

Program utama yang akan dilakukan:

- Menyusun dan melaksanakan program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara efisien dengan strategi, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Menyempurnakan manual sistem informasi sarana dan prasarana perusahaan.
- Menyusun, melaksanakan dan memantau pelaksanaan inventarisasi asset perusahaan.
- Mengembangkan dan mengkampanyekan budaya program divestasi/penghapusan.
- Pengadaan dan penjualan tanah serta optimalisasi asset perusahaan.
- Sertifikasi tanah.

Strategi Bidang Pengawasan

Fokus pada upaya menjamin agar perusahaan dikelola secara produktif dan efisien serta dipatuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku guna menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan melalui standarisasi program pengawasan formal.

Program utama yang dilakukan:

- Menyusun kebijakan pokok dan program Satuan Pengawasan Intern.
- Menyempurnakan manual audit.
- Ikut memajukan Perusahaan dengan berdiri sebagai konsultasi di obyek pemeriksaan guna peningkatan pertumbuhan omset secara sehat dan pelaporan secara akurat bagi cabang yang perlu pembinaan.

Strategi Bidang Pusat Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi

Fokus pada upaya untuk terbinanya para pengusaha kecil dan koperasi dengan dana yang tersedia melalui sistem dan prosedur pembinaan yang efisien dan efektif.

Program utama yang dilakukan:

- Penyaluran bantuan dana pembinaan kepada mitra binaan baru dan lanjutan dengan memprioritaskan “Nasabah Pegadaian” yang mempunyai kegiatan usaha, baik usaha perorangan maupun badan usaha.
- Bekerja sama dengan pihak ekstern/intern dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana pembinaan, baik pinjaman maupun hibah.

- Pengembangan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pemagangan bagi para mitra binaan baru maupun lanjutan sesuai dengan dana yang tersedia.
- Penyempurnaan atau perbaikan sistem dan prosedur yang telah ada.
- Memonitoring pelaksanaan penggunaan Buku Tata Kerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi